

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Salsa Okdania Lubis^{1*}, Dito Aditia Darma Nasution²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia
salsaokdaniaaaaaaa@gmail.com^{1*}, ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id²

Alamat: 4, Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122

Korespondensi penulis: salsaokdaniaaaaaaa@gmail.com

Abstract: *This research aims to examine the influence of regional economic growth, original regional income, general allocation funds, special allocation funds on regional expenditure. The population in this study used 33 regencies/cities in North Sumatra with observations for 4 years from 2018 - 2021. The approach used in this research was an associative approach and the data analysis technique used was Multiple Linear Regression Analysis. The sampling method used in this research is the Census. This research was processed using SPSS Version 23. The results of this research show that Regional Economic Growth has no effect on regional expenditure, Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds have a positive effect on Regional Expenditure. Regional Economic Growth, Original Regional Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds Simultaneously Influence Regional Expenditures.*

Keywords: *Regional Economic Growth, Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Expenditures.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pertumbuhan Ekonommi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap *Belanja Daerah*. Populasi dalam penelitian ini menggunakan 33 Kab/Kota di Sumatera Utara Dengan pengamatan selama 4 tahun dari 2018 - 2021.. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif dan teknik analisa data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sensus*. Penelitian ini diolah menggunakan SPSS Versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perumbuhan Ekonomi Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Secara Simultan Berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah.

1. PENDAHULUAN

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda dalam membiayai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber pada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum ini menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa

Dana Alokasi umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh untuk membiayai Belanja Daerah di daerahnya. Menurut Nordiawan (2017: 87) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut halim (2014: 16) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (persen), 2018–2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
Kabupaten				
01 Nias	4,41	1,07	0,01	1,18
02 Mandailing Natal	4,84	4,02	-5,61	1,71
03 Tapanuli Selatan	4,55	4,58	-5,61	1,99
04 Tapanuli Tengah	3,36	2,14	3,98	1,04
05 Tapanuli Utara	3,62	3,68	-1,55	2,46
06 Toba	4,45	4,34	-10,85	1,24
07 Labuhanbatu	3,35	2,34	1,62	2,17
08 Asahan	4,78	4,53	-4,42	2,37
09 Simalungun	4,64	4,65	-11,03	1,85
10 Dairi	4,52	4,51	-8,59	0,79
11 Karo	2,90	2,06	3,18	0,90
12 Deli Serdang	3,15	1,96	13,27	1,54
13 Langkat	4,30	4,32	0,49	2,51
14 Nias Selatan	4,09	3,73	-9,90	-0,07
15 Humbang Hasundutan	4,05	3,59	-3,26	0,68
16 Pakpak Bharat	3,79	2,77	-4,89	0,07
17 Samosir	4,97	5,41	-7,81	1,41
18 Serdang Bedagai	4,88	5,18	-6,64	1,93

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

19 Batu Bara	3,39	3,03	1,74	1,53
20 Padang Lawas Utara	3,66	2,45	7,47	1,78
21 Padang Lawas	3,77	2,10	10,89	2,42
22 Labuhanbatu Selatan	3,34	2,17	10,48	2,64
23 Labuhanbatu Utara	4,26	3,93	-3,82	2,44
24 Nias Utara	3,72	3,78	-4,38	0,64
25 Nias Barat	4,29	10,32	-7,29	1,37
Kota				
26 Sibolga	4,98	5,03	-3,58	1,58
27 Tanjungbalai	4,48	4,04	-0,07	1,12
28 Pematangsiantar	3,98	3,84	-6,13	0,00

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi pada daerah Sumatera Utara, adapun nilai pertumbuhan ekonomi fluktuatif di tiap kab/kota. Nilai pertumbuhan ekonomi paling rendah ada pada daerah Kab Simalungun pada tahun 2018 nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64 lalu naik di 2019 menjadi 4,65 lalu turun sangat drastis di 2020 menjadi -11,03 lalu naik di 2021 menjadi 1,85, penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 dikarenakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak baik dikarenakan dampak covid-19 kab Simalungun sampai memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang negatif. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi pada Kab Simalungun, pada Kab Dairi pun memiliki nilai Pertumbuhan Ekonomi yang negatif tahun 2018 4,52 lalu turun di 2019 menjadi 4,51 lalu turun sangat drastis di 2020 menjadi -8,59 lalu naik menjadi 0,79 di 2021. Penurunan ini juga akibat dari adanya pandemi covid-19 di awal tahun 2020 sampai akhir 2020 yang sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Jika nilai pertumbuhan ekonomi rendah maka belanja daerah juga akan rendah karena karena pembangunan infrastruktur juga rendah.

Tabel 2. Nilai PAD, DAU, DAK

Kabupaten /Kota	Tahun			
		PAD	DAU	DAK
Asahan	2018	142.972.039.821	877.794.638.000	233.204.708.489
	2019	149.647.050.442	917.363.719.000	228.340.201.515
	2020	159.308.333.491	830.586.749.000	202.063.660.928
	2021	134.864.406.995	818.690.000.000	207.020.000.000
Dairi	2018	73.906.829.603	612.742.762.000	154.914.774.714
	2019	74.360.339.718	629.145.028.000	182.980.494.845
	2020	89.758.997.873	565.078.900.000	140.116.339.746
	2021	72.268.890.301	557.120.000.000	225.740.000.000
Deli Serdang	2018	729.648.594.489	1.468.561.952.000	455.242.047.339
	2019	825.375.281.297	1.513.584.154.000	431.040.134.425

	2020	809.719.829.264	1.376.847.320.000	399.214.595.919
	2021	926.137.759.153	1.354.890.000.000	410.890.000.000
Karo	2018	159.189.197.472	738.378.312.000	184.960.051.262
	2019	117.683.657.833	758.968.872.000	205.259.356.001
	2020	100.334.824.835	687.569.658.000	155.347.855.031
	2021	108.359.804.241	679.140.000.000	207.160.000.000
Labuhan Batu	2018	162.794.472.017	680.408.474.000	199.352.228.211
	2019	175.335.685.317	686.644.553.000	197.293.027.843
	2020	161.486.609.119	633.797.327.000	140.490.061.851
	2021	238.194.215.394	638.230.000.000	263.240.000.000
Langkat	2018	136.680.578.541	1.179.392.864.000	394.009.558.741
	2019	167.523.076.880	1.229.427.123.000	353.474.263.025
	2020	168.843.723.199	1.099.658.531.000	319.005.886.019
	2021	158.480.919.772	1.081.980.000.000	344.090.000.000
Mandailing Natal	2018	84.809.923.496	783.200.132.000	248.799.513.596
	2019	98.758.815.328	816.400.130.000	167.986.948.324
	2020	90.454.777.184	751.402.758.000	212.031.831.828
	2021	142.409.606.087	742.350.000.000	326.660.000.000
Nias	2018	88.754.606.115	428.647.259.166	166.785.764.834
	2019	107.639.139.180	443.235.113.000	167.986.948.324
	2020	103.755.392.882	417.880.380.000	117.965.830.614
	2021	103.944.559.551	412.620.000.000	117.240.000.000
Simalungun	2018	164.107.850.129	1.177.957.174.120	364.957.717.597
	2019	191.940.130.095	1.239.639.944.134	359.478.626.880
	2020	159.319.208.782	1.136.239.874.000	338.320.956.640
	2021	177.646.004.174	1.120.790.000.000	347.440.000.000
Tapanuli Selatan	2018	140.044.217.234	642.196.018.670	165.245.425.061
	2019	167.458.157.940	676.183.229.000	168.548.495.566
	2020	132.010.127.162	604.693.533.000	154.972.345.474
	2021	134.093.420.731	595.550.000.000	179.940.000.000
Tapanuli Tengah	2018	76.660.883.410	627.027.553.000	241.018.512.560
	2019	88.441.123.323	670.689.528.000	178.925.114.382
	2020	87.469.317.632	609.816.945.000	218.264.632.937
	2021	84.473.837.625	603.230.000.000	195.570.000.000
Tapanuli Utara	2018	105.656.762.964	639.394.068.000	191.102.620.448
	2019	113.990.759.582	659.877.311.000	217.541.422.877
	2020	133.375.094.966	606.062.527.000	177.818.198.764
	2021	162.791.620.432	597.640.000.000	204.910.000.000
Toba Samosir	2018	52.298.960.803	528.490.802.000	158.583.010.253
	2019	68.046.526.605	548.690.496.000	172.432.388.564
	2020	57.403.162.933	519.088.428.000	122.700.768.936
	2021	75.305.600.200	510.870.000.000	172.570.000.000
Binjai	2018	135.870.920.433	564.377.582.000	129.936.136.339

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

	2019	108.954.526.370	585.637.664.000	119.769.918.792
	2020	112.273.586.101	535.778.557.000	108.912.483.140
	2021	91.986.343.406	532.630.000.000	134.340.000.000
Medan	2018	1.636.204.514.684	1.583.624.375.000	356.788.804.200
	2019	1.829.665.882.248	1.660.238.913.000	357.393.699.115
	2020	1.509.483.588.167	1.493.919.764.000	345.118.339.574
	2021	1.906.512.189.047	1.526.070.000.000	288.470.000.000
Pematang Siantar	2018	137.052.839.193	583.106.207.000	188.366.544.385
	2019	125.018.502.648	616.197.680.000	150.268.899.713
	2020	140.047.128.354	565.804.258.000	103.324.466.094
	2021	137.849.088.370	556.770.000.000	105.820.000.000
Sibolga	2018	81.245.733.812	405.554.215.000	90.935.128.378
	2019	69.312.217.832	422.054.364.000	67.329.016.133
	2020	79.539.316.412	391.676.849.000	56.050.751.670
	2021	76.263.787.133	384.540.000.000	63.450.000.000
Tanjung Balai	2018	74.435.277.572	418.666.416.000	90.844.606.170
	2019	63.721.315.845	446.820.629.000	82.010.744.888
	2020	63.478.937.585	410.581.497.000	64.807.380.904
	2021	58.650.167.941	403.250.000.000	76.450.000.000
Tebing Tinggi	2018	114.048.354.143	425.818.194.832	114.868.858.164
	2019	105.239.918.352	432.026.492.000	102.896.356.548
	2020	90.981.301.747	393.452.394.000	98.110.831.639
	2021	82.930.324.048	386.850.000.000	91.120.000.000
Padang Sidempuan	2018	75.063.575.093	498.221.822.177	124.683.309.074
	2019	87.432.283.185	524.337.438.000	155.293.107.195
	2020	64.004.142.634	476.335.400.000	108.546.738.806
	2021	59.865.657.758	468.090.000.000	127.300.000.000
PakPak Bharat	2018	20.061.207.923	339.271.690.000	71.532.318.937
	2019	33.915.957.645	354.721.524.000	96.835.290.394
	2020	21.690.799.282	323.371.339.000	58.949.433.899
	2021	24.443.194.479	318.570.000.000	87.850.000.000
Nias Selatan	2018	19.605.734.782	556.174.150.536	199.651.552.996
	2019	25.664.883.761	588.723.530.000	258.903.689.413
	2020	16.598.894.145	626.743.578.000	327.268.982.509
	2021	32.822.654.372	617.560.000.000	280.100.000.000
Humbang Hasundutan	2018	92.735.853.813	523.818.445.000	142.133.738.492
	2019	73.757.931.630	536.163.886.000	159.895.201.616
	2020	67.936.178.388	489.171.029.000	147.243.553.391
	2021	26.917.795.029	481.830.000.000	148.760.000.000
Serdang Bedagai	2018	194.382.972.213	763.943.386.000	310.984.166.553
	2019	143.144.170.557	798.240.981.000	240.773.202.269
	2020	120.028.357.474	727.436.456.000	258.489.830.508

	2021	133.466.455.515	718.140.000.000	268.400.000.000
Samosir	2018	47.446.623.389	453.737.230.000	139.883.498.974
	2019	60.497.449.963	465.249.052.000	158.568.606.709
	2020	60.373.806.629	418.883.094.000	112.467.378.166
	2021	61.871.566.524	414.130.000.000	144.680.000.000
Batu Bara	2018	64.385.292.862	602.464.355.000	151.358.139.644
	2019	129.221.846.897	628.895.139.000	144.562.197.837
	2020	166.023.316.040	565.927.402.000	135.549.491.455
	2021	174.549.720.181	555.510.000.000	152.280.000.000
Padang Lawas	2018	47.455.308.607	521.562.942.000	157.464.009.272
	2019	52.067.312.091	541.104.708.000	194.816.768.026
	2020	44.055.621.274	496.576.468.000	150.303.001.162
	2021	46.759.858.387	490.260.000.000	138.150.000.000
Padang Lawas Utara	2018	74.306.097.500	537.455.568.015	138.216.844.240
	2019	42.929.111.658	554.953.633.000	186.769.349.619
	2020	51.975.624.588	521.528.022.000	149.124.201.013
	2021	43.312.600.311	513.910.000.000	163.460.000.000
Labuhan Batu Selatan	2018	52.209.768.574	504.525.796.000	147.933.110.879
	2019	75.687.647.545	522.907.314.000	131.522.369.031
	2020	55.858.593.110	479.785.624.000	126.442.210.674
	2021	63.254.710.984	472.760.000.000	130.740.000.000
Labuhan Batu Utara	2018	57.010.690.546	588.021.836.000	235.115.494.290
	2019	70.122.562.532	611.629.351.000	169.410.066.200
	2020	55.494.095.702	560.374.058.000	135.193.128.593
	2021	58.863.185.741	552.460.000.000	180.240.000.000
Nias Utara	2018	50.395.504.636	413.338.900.108	138.222.720.874
	2019	57.961.363.630	429.134.187.000	219.511.306.652
	2020	58.878.959.974	392.014.347.000	153.976.308.750
	2021	20.175.811.945	388.380.000.000	139.370.000.000
Nias Barat	2018	40.193.008.207	347.722.710.417	207.417.409.039
	2019	18.411.235.998	359.696.030.000	194.289.160.199
	2020	19.578.221.852	332.435.947.000	131.079.083.851
	2021	18.267.918.507	329.530.000.000	117.230.000.000
Gunung Sitoli	2018	29.456.354.563	426.758.929.000	109.906.226.086
	2019	32.209.121.389	446.102.654.000	99.517.685.019
	2020	25.530.252.953	406.222.095.000	107.368.958.345
	2021	21.417.950.730	399.420.000.000	112.070.000.000

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa nilai PAD tiap kab/ kota cenderung fluktautif adapun nilai PAD yang paling rendah ada pada Kab Toba Samosir dilihat dari nilai PAD pada tahun 2018 sebesar 52.298.960.803 lalu naik di 2019 menjadi 68.046.526.605 lalu turun di 2020 menjadi 57.403.162.933 lalu naik lagi di 2021 menjadi 75.305.600.200, nilai

PAD yang tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai PAD maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat namun sebaliknya semakin rendah nilai PAD maka pemerintah yang nilai PAD ya rendah masih memerlukan ketergantungan yang kuat pada pemerintah pusat. Tidak hanya pada kab Toba Samosir nilai PAD yang rendah juga dirasakan oleh kab Nias Selatan Nilai PAD pada tahun 2018 sebesar 19.605.734.782 lalu naik di 2019 menjadi 25.664.883.761 lalu turun lagi di 2020 menjadi 16.598.894.145 lalu naik lagi di 2021 menjadi 32.822.654.372 semakin rendah nilai PAD maka pemerintah yang nilai PAD ya rendah masih memerlukan ketergantungan yang kuat pada pemerintah pusat.

2. LANDASAN TEORI

Teori Stewardship

Grand theory dalam Penelitian ini adalah menggunakan Stewardship Theory, Teori Stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat Antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Etty Murwaningsih (2019) teori Stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwamanusia dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan manusia merupakan individu yang berintegrasi. Pemerintah selaku stewardship dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin Antara pemerintah (stewardship) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi.

Otonomi Daerah

Dalam UU No.32 tahun 2004 pasal 1 dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut F. Sugeng Istianto: Otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Menurut Benyamin Hoesein: Otonomi Daerah merupakan pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional Negara secara informal berada diluar pemerintah pusat.

Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti yang dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD berisi anggaran mengenai pendapatan dan rincian Belanja Daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod- Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan

setiap tahun dalam APBN. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2017) “ Analisis asosiatif merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh dan hubungan dari dua variabel ataupun lebih dengan pengujian statistik dimana hasilnya membuktikan hipotesis ditolak atau diterima”. Pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono (2016) yaitu “ penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Penelitian ini terdiri dari variabel independen seperti variabel (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) dan variabel dependen (Belanja Modal)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Table 3. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PED	132	-11,03	90,00	2,5260	8,68539
PAD	132	1659889414	190651218	1624882369	3088369
DAU	132	5,00	9047,00	75,3939	95139,85860
DAK	132	3185700000	166023891	6396025926	2916797
BD	132	00,00	3000,00	98,2953	76964,12830
Valid N (listwise)	132	5605075167	455242047	1852684252	8687774
		0,00	339,00	03,4849	6357,37514
		4945514796	506072568	1282235368	8031018
		04,00	6081,00	431,8713	81781,88320

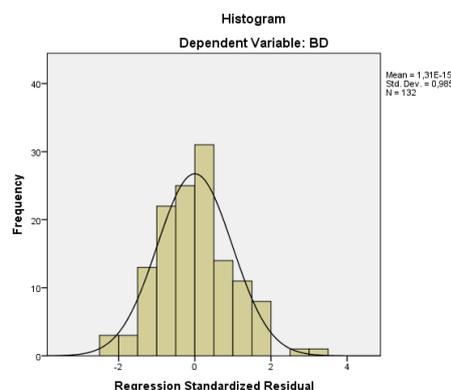
Source: SPSS v.23 output

Sesuai tabel 3 di atas Variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah (X_1) nilai N sebanyak 132 Nilai Minimum -11,03 Nilai Maximum 90,00 Nilai Mean 2,52 Dan Standard Deviation 8,68, Pada variabel Pendapatan Asli Daerah Nilai N sebanyak 132 Nilai Minimum 16.598.894.145 nilai maximum 1.906.512.189.047,00 nilai mean sebesar 162.488.236.975,3939 nilai standard deviation 308.836.995.139,85860. Pada variabel Dana Alokasi Umum Nilai sebanyak 132 nilai minimum 318.570.000.000,00 nilai maximum 1.660.238.913.000,00 nilai mean 291.679.776.964,12830 pada variabel Dana Alokasi Khusus nilai sebanyak 132 dengan nilai minimum 56050751670,00 nilai maximum 455.242.047.339,00 nilai mean 185.268.425.203,4849 nilai standard deviation 86.877.746.357,37514. Pada variabel belanja daerah nilai sebanyak 132 dengan nilai minimum 494551479604,00 nilai maximum 506.072.568.6081,00 nilai mean 1282235368431,8713 dan nilai standard deviation 803.101.881.781,88320

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) tujuan dari uji normalitas adalah sebagai berikut: “Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak.



Gambar 1. Histogram

Berdasarkan hasil uji histogram dapat dilihat bahwa data menyebar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Residual Plots dan uji Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan nilai probabilitas 0,05 (Yudhiana, 2016). Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			132
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	,0001369
		Std. Deviation	1041102034 60,33667000
Most Extreme Differences	Absolute		,062
	Positive		,062
	Negative		-,026
Test Statistic			,062
Asymp. Sig. (2-tailed)			,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			

Perhitungan Kolmogorov-Smirnov kemudian digunakan. Jika nilai signifikansi asimtotik data variabel (2-ekor) lebih besar dari 0,05, distribusi normal untuk data dapat disimpulkan. Di bawah ini adalah hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov yang digunakan SPSS untuk menentukan normalitas semua variable. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa nilai kolmogrov-Smirnov $0,200 > 0,05$ artinya data berdistribusi normal.

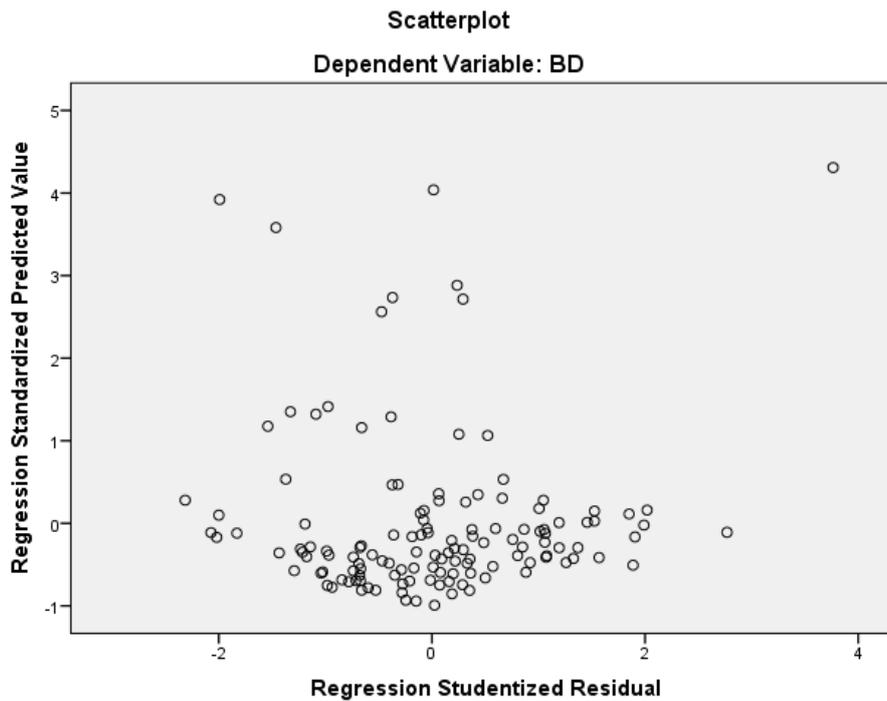
b. Uji Multikoleniaritas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	IF
(Constant)	- 58726851599,970	28410576 737,600		- 2,067	,041		
PED	- 272554728,380	10665100 68,834	- ,003	-,256	,799	,995	,005
PAD	1,078	,053	,415	20,350	,000	,319	,137

DAU	1,292	,096	,469	13,511	,000	,110	,120
DAK	1,835	,240	,198	7,647	,000	,196	,091

Berdasarkan uji tabel 5 di atas menunjukkan bahwa semua nilai VIF dalam penelitian ini mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1. Maka dapat dikatakan data tersebut terbebas dari multikolinearitas



Gambar 2. UJI HETEROSKEDASITAS

Pada grafik scatter-plot di atas terlihat bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dan sebaran titik-titik tetap berada disekitaran titik 0, maka pengujian ini bebas dari masalah heteroskedasitisitas.

Tabel 6. Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,992 ^a	,983	,983	105737023918,85446	2,249

a. Predictors: (Constant), DAK, PED, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 6 nilai durbin watson yang dihasilkan dari model regresi adalah 2,249 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai DU. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian (K) = 4 dan jumlah data sebanyak 132 (n) sehingga diperoleh nilai tabel DU sebesar 1.7786. Dari hasil tersebut, maka dapat dibandingkan $DU (1,7786) < DW (2,249) \leq 4 - DU (4 - 1,7786 = 2.2214)$. Berdasarkan hasil perbandingan nilai durbin watson tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 7. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-58726851599,970	28410576737,600		-2,067	,041
	PED	-272554728,380	1066510068,834	-,003	-,256	,799
	PAD	1,078	,053	,415	20,350	,000
	DAU	1,292	,096	,469	13,511	,000
	DAK	1,835	,240	,198	7,647	,000

a. Dependent Variable: BD

Dari tabel 7 memaparkan bahwa nilai koefisien variabel bebas (Pengaruh *Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah*) dari hasil nilai kolerasi yang dihasilkan dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

$$Y = -58726851599,970 - 272554728,380X_1 + 1,078X_2 + 1,292 X_3 + 1,835X_4 + e$$

Pernyataan dari persamaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut ini :

- 1) Nilai konstanta dari hasil yang diperoleh sebesar -58726851599,970 dimana *Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus* tidak mempengaruhi, maka akan meningkatkan *Belanja Daerah* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

- 2) Nilai koefisien regresi dari variabel bebas X_1 diperoleh sebesar -272554728,380 dimana arah koefisiennya kearah negatif apabila Pertumbuhan Ekonomi naik satu satuan maka akan menurunkan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sebesar 272554728,380 dengan syarat variabel yang lain tetap/konstan
- 3) Nilai koefisien regresi dari variabel bebas X_2 diperoleh sebesar 1,078 dimana arah koefisiennya kearah positif apabila Pendapatan Asli Daerah naik satu satuan maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sebesar 0.1,078.
- 4) Nilai koefisien regresi dari variabel bebas X_3 diperoleh sebesar 1,292 dimana arah koefisiennya kearah positif apabila *Dana Alokasi Umum* naik satu satuan maka akan menaikkan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sebesar - 1,292 dengan syarat variabel yang lain tetap/konstan.
- 5) Nilai koefisien regresi dari variabel bebas X_4 diperoleh sebesar 1,835 dimana arah koefisiennya kearah positif apabila Dana Alokasi Khusus naik satu satuan maka akan menurunkan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sebesar - 1,835

Tabel 8. Uji T Parsial

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-58726851599,970	28410576737,600		-2,067	,041
	PED	-272554728,380	1066510068,834	-,003	-,256	,799
	PAD	1,078	,053	,415	20,350	,000
	DAU	1,292	,096	,469	13,511	,000
	DAK	1,835	,240	,198	7,647	,000

a. Dependent Variable: BD

Dari pemaparan tabel 8 menunjukkan hasil uji signifikan secara parsial dari setiap variabel penelitian., dari data t-tabel dengan rumus ($df = n - k - 1$ atau $132 - 4 - 1 = 127$) adalah 1.65694. berikut penjelasan dari hasil diatas:

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

- 1) Dari variabel bebas X_1 (Pertumbuhan Ekonomi Daerah) menghasilkan t-hitung $-0,256$, t-sig 0.799 hipotesis diterima jika t-hitung $>$ t-tabel dan t-sig $<$ 0.05 . Dari data diatas diperoleh hasil dari t-hitung $0,256 < 1.65694$ dan t-sig $0.799 > 0.05$. maka kesimpulannya bahwa Pertumbuhan Ekonomi Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Dari variabel bebas X_2 (Pendapatan Asli Daerah) menghasilkan t-hitung 20.350 t-sig 0.000 . hipotesis diterima jika t-hitung $>$ t-tabel dan t-sig $<$ 0.05 . dari data diatas diperoleh hasil dari t-hitung $20.350 > 1,65694$ dan t-sig $0.000 <$ 0.05 . maka kesimpulannya bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak.
- 3) Dari variabel bebas X_3 (Dana Alokasi Umum) menghasilkan t-hitung $13,551$, t-sig 0.000 . hipotesis diterima jika t-hitung $>$ t-tabel dan t-sig $<$ 0.05 . dari data diatas diperoleh hasil dari t-hitung $13,555 >$ $1,65694$ dan t-sig $0.000 <$ 0.05 . maka kesimpulannya bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah artinya H_a diterima dan H_0 ditolak.
- 4) Dari variabel bebas X_4 (Dana Alokasi Khusus) menghasilkan t-hitung 7.647 , t-sig 0.000 hipotesis diterima jika t-hitung $>$ t-tabel dan t-sig $<$ 0.05 . dari data diatas diperoleh hasil dari t-hitung $7.647 >$ 1.65694 dan t-sig $0.000 <$ 0.05 . maka kesimpulannya bahwa Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak.

Tabel 9. Uji F Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	8307151444547347000000 0000,000	4	20767878 6113683670000 00000,000	1857,539	,000 ^b
Residual	1419900414856482700000 000,000	127	11180318 2272163990000 00,000		
Total	8449141486032995000000 0000,000	131			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DAK, PED, PAD, DAU

Dari tabel 9 menghasilkan F-hitung 1857,539 dan t-sig 0.000. untuk nilai F tabel adalah 2.44 dari data diatas diperoleh hasil f-hitung $1857.539 > f\text{-tabel } 2.44$ dan $t\text{-sig } 0.000 < 0.05$ maka kesimpulannya bahwa Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya H_a diterima dan H_o ditolak

Tabel 10. Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,992 ^a	,983	,983	10573702391 8,85446	2,249

a. Predictors: (Constant), DAK, PED, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Dari tabel 10 memaparkan hasil nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0.983 atau 98,3%. Jika nilai R^2 menunjukkan hasil yang semakin tinggi maka model yang digunakan sangat tepat untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya, syaratnya diposisi antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$) dari kondisi diatas menjelaskan bahwa variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dapat menjelaskan sebesar 98,3% dan sisanya 1,7 % ditentukan dari variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Daerah) menghasilkan t-hitung $-0,256$, t-sig 0.799 hipotesis diterima jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan $t\text{-sig} < 0.05$. Dari data diatas diperoleh hasil dari t-hitung $0,256 < 1.65694$ dan $t\text{-sig } 0.799 > 0.05$. maka kesimpulannya bahwa Pertumbuhan Ekonomi Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah yang artinya H_o diterima dan H_a ditolak. Berdasarkan hasil uji data pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja daerah itu artinya nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mempengaruhi belanja pada daerah yang ada di Sumatera Utara. Belanja daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belajar subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada sumatera utara tidak mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Secara tradisional pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang

berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/ PDRB. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi fiskal untuk kepentingan pelayanan public. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triana & Iin (2014) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah) menghasilkan t-hitung 20.350 t-sig 0.000. hipotesis diterima jika t-hitung > t-tabel dan t-sig < 0.05. dari data diatas diperoleh hasil dari t-hitung 20.350 > 1,65694 dan t-sig 0.000 < 0.05. maka kesimpulannya bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya H_a diterima dan H_o ditolak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, pendapatan daerah ialah Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Jika pendapatan daerah tinggi maka belanja daerah juga akan tinggi tetapi daerah dengan nilai pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan bahwa dia mandiri dalam mengurus daerahnya sendiri.

c. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum) menghasilkan t-hitung 13,551, t-sig 0.000. hipotesis diterima jika t-hitung > t-tabel dan t-sig < 0.05. dari data diatas diperoleh hasil dari t-hitung 13,555 > 1,65694 dan t-sig 0.000 < 0.05. maka kesimpulannya bahwa *Dana Alokasi Umum* secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah artinya H_a diterima dan H_o ditolak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah. Semakin tinggi dana alokasi umum maka semakin tinggi juga belanja daerah yang dilakukan pada daerah Sumatera Utara kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cantika (2023) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah.

d. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus) menghasilkan t-hitung 7.647, t-sig 0.000 hipotesis diterima jika t-hitung > t-tabel dan t-sig < 0.05. dari data diatas diperoleh hasil dari t-hitung $7.647 > 1.65694$ dan t-sig $0.000 < 0.05$. maka kesimpulannya bahwa Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum. Semakin tinggi dana alokasi khusus maka semakin tinggi tingkat belanja daerah pada daerah Sumatera utara, penelitain ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eti Sari (2017) bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja daerah.

Dana Alokasi Khusus, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum. maka semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitain yang dilakukan Alvaro (2022) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

e. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Dari tabel 4.9 menghasilkan F-hitung 1857,539 dan t-sig 0.000. untuk nilai F tabel adalah 2.44 dari data diatas diperoleh hasil f-hitung $1857.539 > f\text{-tabel } 2.44$ dan t-sig $0.000 < 0.05$ maka kesimpulannya bahwa Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Dari tabel 1.5 memaparkan hasil nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0.983 atau 98,3%. Jika nilai R^2 menunjukkan hasil yang semakin tinggi maka model yang digunakan sangat tepat untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya, syaratnya diposisi antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$) dari kondisi diatas menjelaskan bahwa variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dapat menjelaskan sebesar 98,3% dan sisanya 1,7 % ditentukan dari variabel lain diluar penelitian ini.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji data pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja daerah itu artinya nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mempengaruhi belanja pada daerah yang ada di Sumatera Utara. Belanja daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada Sumatera Utara tidak mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, pendapatan daerah ialah Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Jika pendapatan daerah tinggi maka belanja daerah juga akan tinggi tetapi daerah dengan nilai pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan bahwa dia mandiri dalam mengurus daerahnya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah. Semakin tinggi dana alokasi umum maka semakin tinggi juga belanja daerah yang dilakukan pada daerah Sumatera Utara kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cantika (2023) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum. Semakin tinggi dana alokasi khusus maka semakin tinggi tingkat belanja daerah pada daerah Sumatera Utara, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eti Sari (2017) bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dalail (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018 Naskah Publikasi. Universitas Jakarta.
- Ang Sandera Widjajakoesoema (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri Naskah Publikasi. Cahaya Surya.
- Deva Yuliyati (2022). Pengaruh Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Jawa Barat Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Duwi Priyatno. (2013). Olah Data Statistik Dengan Program PSPP. Yogyakarta: Penerbit Mediakom
- Eka Ainingrum (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Pangkep Naskah Publikasi. Cahaya Surya.
- Imam Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi V. Badan Penerbit UNDIP. Semarang
- Irsyadi, M.A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah). Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kemenkeu DJPK. <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. Diakses Pada tanggal 22 Desember 2022.
- Kemenkeu.(2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Kemenkeu.(2005). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Permatasari, I. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur.Jurnal Imu dan Riset Akuntansi Volume 5, Nomor 1.
- Purwanto, F.P.D. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008- 2011)”.Skripsi.Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sularno, F. M. (2013). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)”.Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Wandira, A.G. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012)”.Skripsi.Universitas Negeri Semarang.
- www.djpk.depkeu.go.id. Diakses 30 2022 Agustus pukul 14.15 WIB